



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jl. Ir. Juanda Nomor. 198 Telp./Fax. (0352) 481878, Kode Pos 63412

Website : <https://kominfo.ponorogo.go.id>, Email : kominfo@ponorogo.go.id

PONOROGO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188.4/ 1265 /405.19/2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KEGIATAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN PONOROGO SELAKU ATASAN PPID,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan Penguatan Kelembagaan PPID di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, maka perlu adanya Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Perki Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknis Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2021
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 1 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUPATEN PONOROGO
SELAKU ATASAN PPID



Drs. H. NAJIB SUSILO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19621017 198710 1 002

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah dirapatkan terhadap informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI / KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
1	Arsip peta foto udara	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum /pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
3	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
4	Disposisi surat pimpinan	Pasal 17 Huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI / KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
5	Rencana pelaksanaan tukar-menukar/ pemindah tangan barang daerah	Pasal 17 huruf e dan I Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai
6	Surat pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh di ungkap.
7	Keputusan alat alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	Pasal 17 huruf I dan j Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
8	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala /Wakil Kepala Daerah	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Setelah proses pengesahan / pengangkatan selesai	Mendahului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)
9	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata	Pasal 17 huruf a, I, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
10	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan Plt Kades	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
11	Proses pengangkatan perangkat desa	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
12	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 huruf a, h, dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
13	Rancangan produk hukum daerah.	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
14	Dokumen dan Informasi Perkara yang sedang ditangani oleh PPNS	Pasal 17 Huruf a dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
15	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
16	Berita Acara pemeriksaan	- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 huruf a dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
17	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Th 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018	Tidak terbatas	(1) Mengungkapkan rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh di ungkap	(1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap.
18	Proses Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
19	Proses Penetapan Keputusan Gubernur Jateng Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	Pasal 17 huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
21.	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan \\ (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
22.	Data kegiatan intelegen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	Pasal 17 huruf c, I, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/ wilayah dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
23	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	

				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
24	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	Pasal 17 huruf a, I, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
25	Usulan calon penerima bantuan sosial	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
26	Rencana alokasi bersubsidi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	Dapat merugikan ketahanan Ekonomi	Melindungi ketahanan Ekonomi
27	Proses scanning UN/UNPK/UASBN	pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
28	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
29	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap Rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap Informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh dingkap	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap
30	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	Pasal 17 huruf h dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
31	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
32	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik	Tidak Terbatas	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terlambat
31	Data pribadi penduduk	Pasal 17 huruf h dan j UU Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan public berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan public	Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi
32	Daftar rekam medik PNS	Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Atas ijin yang bersangkutan dan selama menjadi PNS	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
33	Data tentang penyandang HIV/AIDS dan eks WTS	Pasal 17 huruf h , I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,	Atas ijin yang bersangkutan dan ijin dari pemangku kepentingan kebijakan	(1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	(1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
34	Surat Perijinan/Ijin Usaha beserta dokumennya	Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komi Informasi Publik	Sampai dikeluarkannya ijin usaha; selama ijin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Menjaga privasi dari pemegang izin
35	Data kekayaan alam	Pasal 17 huruf d dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komi Informasi Publik	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
36	Kajian pemerintah Pusat dan Berita Acara Pelepasan Tanah Kas Desa	Pasal 17 huruf e dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komi Informasi Publik	Setelah kebijakan diputuskan oleh pemerintah	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
37	Kajian pemerintahan pusat dan berita acara pelepasan tanah aset pemerintah daerah	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komi Informasi Publik	Sampai selesai proses	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengedepankan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
38	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP,	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
39	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP,	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
40	Perangkat khusus persandian	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
41	Kunci sistem sandi	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
42	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
43	Jalur komunikasi VVIP	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamananNegara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
44	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
45	Berita/Radiogram rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara
46	Hasil eksplorasi detail (Koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas dan Kuantitas Komoditas Tambang)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, d, e, dan j	Bila potensi sudah diusahakan / dikelola	Berpotensi spekulasi yang ingin mengelola demi kepentingan pribadi / korporasi	Membuka investasi yang bertanggung jawab
47	Laporan studi kelayakan/PS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan, Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d	Sampai dengan terpelihnya	Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha pertambangan dalam menjalankan kegiatannya	Melindungi pelaku usaha pertambangan dari persaingan yang tidak sehat
48	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	Pasal 17 UU NO. 14 Tahun 2008 Huruf b, d, e, dan j	Setelah laporan evaluasi dikeluarkan oleh yang berwenang melakukan evaluasi	Mengganggu obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan	Menjaga obyektifitas evaluasi yang akan dilakukan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
49	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d dan j	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
50	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	Pasal 17 UU NO.14 Tahun 2008 Huruf b, d, dan j	Setelah penilaian oleh yang berwenang dapat diselesaikan	Potensi timbulnya manipulasi data oleh pihak pemakai	Mengamankan dari potensi adanya manipulasi
51	Surat pengajuan Hak Merk, Cipta, Paten, dan Desain yang masih dalam proses KEMENHUKHAM	Pasal 17 UU NO.14 Tahun 2008 Huruf b	Sampai selesainya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
52	Data Debitur dana bergulir	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3	Atas permintaan penyidikan	Informasi dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan orang lain	Menghindari informasi yang keliru yang bisa merugikan orang lain
53	Bandwidth Management	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
54	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Eksport	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan I	Selama proses sedang berlangsung		

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
55	Lokasi Server	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
56	Internet Protocol/ IP Address Private	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
57	Sistem Keamanan Informasi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b, I dan j	Selama masih difungsikan / digunakan	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan Negara	Terjaga dari potensi kerugian
58	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j	Sampai proses selesai / diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan penghadaan barang / jasa sesiaio dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
59	Rincian Harga Perkiraan sendiri (HPS)	- Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang / jasa

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
60	Dokumen penawaran kontrak	- Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, I, dan j	Sampai proses penawaran kontrak selesai	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
61	Susunan pokja pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- Perpres RI No 16 Th 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j	Selama proses pengadaan barang / jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
62	Hasil Uji Laboratorium tentang keamanan pangan produk segar	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf b dan I	Sampai diketahuinya hasil uji lab	Bisa berpotensi dipalsukan	Mencegak pemalsuan oleh orang yang tidak bertanggungjawab
63	Biodata individu dan data keluarga : a. Ketenagakerjaan b. Transmigrasi	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
64	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h, I, dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
65	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Pasal 17 UU N. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketentraman masyarakat yang terkait drngan bidang kesehatan	Menjaga ketentraman masyarakat
66	Hasil Monitoring adanya dugaan penyimpangan PNPM dan program bantuan kepada pemerintah desa/Kelurahan dan kelompokmasyarakat	Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani masalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik
67	Dokumen Hasil pengawasan melekat (Waskat)	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf h, I, dan j	Atas ijin dari pihak yang menjadi subyek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
68	Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP), dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang diperiksa	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
69	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
70	Soal – soal ujian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
71	Hasil evaluasi tenaga pengajar dan peserta diklat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai selesainya evaluasi yang dilaksanakan	Mengganggu evaluasi dan tujuan pelaksanaan evaluasi	Menjaga akuntabilitas evaluasi
72	Data hasil check Up perorangan PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
73	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada ijin yang bersangkutan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
74	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan	Menggangu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
75	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf I	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan	Menggangu kebijakan pemerintah / pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
76	Notulen hasil sidang Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
77	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sampai hasil baperjakat ditindaklanjuti	Menggangu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
78	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Menggangu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
79	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun	Pertimbangan pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
80	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 UU NO. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
81	SK pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
82	Daftar nilai DP3 PNS dan SKP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Atas ijin yang bersangkutan	Menggnggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
83	Keputusan penjatuhan Hukum disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal17 huruf a, huruf h dan huruf I	Sampai turunnya penjatuhan hukum disiplin	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas putusan
84	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
85	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. Kenaikan pangkat b. Kenaikan gaji berkala c. Mutasi d. Pensiun e. Administrasi kepegawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan / menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
86	Biodata elektronik PNS lengkap	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan menjadi PNS	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privacy yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
87	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
88	Arsip data perorangan PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, I, dan j	Selama yang bersangkutan berstatus sebagai PNS	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
89	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah usulan direalisasikan	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	

				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
90	Daftar pejabat yang akan dilantik	Pasal 17 UU NO. 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK / pelantikan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
91	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf I	Sampai selesainya nominasi secara lengkap	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
92	Instrumen Tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf I	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam proses tes potensi / kompetensi PNS / pejabat	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
93	Identifikasi potensi PNS	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 Huruf h, I, dan j	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi rahasia PNS yang bersangkutan
94	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I dan jh	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

NO	KONTEN INFORMASI/ KODE SURAT	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
95	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuannya	Pasal 17 UU NO 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah selesainya audit	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas pengelolaan administrasi keuangan

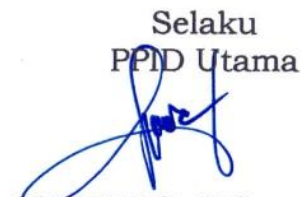
Mengetahui,
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
 DAN STATISTIK KABUPATEN PONOROGO



Selaku
 Atasan PPID

Drs. H. NAJIB SUSILO, MM.
 Pembina Utama Muda
 19621017 198710 1 002

Menyetujui,
 KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN
 KOMUNIKASI PUBLIK



Selaku
 PPID Utama

SUHARNO, S.Sos., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19660102 199003 1 009